

**ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGKALAN TAHUN 2019 – 2021**

Riski Purnama Sari
Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : riskiripsa@gmail.com

ABSTRAK

**ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK
MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2019 – 2021**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya rasio keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Rasio keuangan daerah yang digunakan adalah : (1) Rasio kemandirian keuangan daerah, (2) rasio derajat desentralisasi fiskal, (3) rasio efektivitas PAD, (4) rasio keserasian belanja.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diolah adalah Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 - 2021 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil perhitungan dan analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bangkalan berada pada kriteria instruktif. Tingkat kemandirian daerah yang rendah sekali ini menunjukkan lemahnya kemandirian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dimana masih sangat ketergantungan pada kontribusi serta perananan pemerintah pusat. Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan masih kurang, Hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Namun, tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan terbilang sangat efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan keseimbangan antar belanja belum seimbang. Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan dengan kegiatan Belanja Langsung. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

Kata kunci : Analisis Rasio Keuangan APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas, dan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain. Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor- sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat diperlukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah setiap periode, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD adalah Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara mengitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya adalah dengan mengitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah. Dengan berdasarkan pada ringkasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka penulis mengambil judul: “ **Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 – 2021**”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2.2 Pengukuran Kinerja

M. Ramli Faud (2016) menjelaskan laporan kinerja keuangan adalah laporan realiasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

M. Ramli Faud (2016), menjelaskan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Kemudian, laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah sekarang dan kedepan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya.

Mahmudi (2019) menjelaskan analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

a. Rasio Kemandirian

Mahmudi, (2019) mengatakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat/provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \quad (1)$$

b. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Mahmudi (2019), Mengatakan Rasio Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

(2)

c. Rasio Efektivitas

Mahmudi, (2019) mengatakan Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengantarget penerimaan PAD (dianggarkan).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Rill Daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indicator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien.

e. Rasio Keserasian Belanja

Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain:

Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja =

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\% \quad (6)$$

Belanja Tidak Langsung adalah pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung, sedangkan belanjalangsung merupakan belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Dilihat dari sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (*discretionary expense/ expenditure*), sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (*engineered expense/ expenditure*). Analisis proposi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karenabelanja langsung sangat mempengaruhi kualitas *output* kegiatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Lazyra KS(2016) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Kota Medan”. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar keuangan daerah, Dan untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar keuangan daerah, Dan untuk tingkat rasio pertumbuhan pendapatan yang mengalami penurunan.

Anggra Z Harahap (2018) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 - 2015)”. Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat masih dinilai sangat kurang jika dilihat dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat masih tergolong sangat rendah jika dilihat dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat dapat dikategorikan sudah efektif jika dilihat dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah masih dinilai kurang efisien, Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat jika dilihat dari Rasio Keserasian masih dinilai belum stabil dari tahun ketahun.

Niken Marita Pratiwi (2017) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Dppka) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Kinerja keuangan pada dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah istimewa yogyakarta selama tahun 2012 – 2014 yang dipoksikan dengan perhitungan rasio kemandirian berada dalam kriteria delegatif. Perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal berada dalam kriteria baik. Perhitungan rasio aktivitas menunjukkan bahwa pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja aparatur dibandingkan untuk belanja public artinya kebermanfaatan dana yang dikeluarkan untuk masyarakat masih kurang. Rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan belanja tidak langsung dibandingkan untuk belanja langsung.

2.5 Kerangka Konseptual

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran biaya lebih untuk memperoleh hasil yang lebih. Setiap tahun Kabupaten Bangkalan melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki maupun menambah fasilitas umum. Pembangunan tersebut pastilah berpengaruh pada besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Besar kecilnya rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dijadikan pembuktian apakah kinerja Pemerintah Daerah sudah sesuai atau belum, dilihat dari

perkembangan daerah tersebut.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah Pemerintah Daerah mampu untuk mengidentifikasi perkembangan kinerjanya dari tahun ke tahun. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, rasio desentralisasi fiskal, rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja.

Ada lima macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Bangkalan, yaitu : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal serta sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi kasus (*case study*) adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, dimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas.

Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filafat post positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian ini sering digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut dimana peneliti adalah instrument kunci. Dalam penelitian kualitatif rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang masih bersifat sementara dan akan

berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi social tertentu dengan maksud untuk memahami gejala social yang kompleks.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan dan grafik Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun Anggaran 2019 – 2021. Kemudian dari grafik tersebut ditarik kesimpulan berkenaan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap yang bersangkutan secara langsung yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Wr 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan April - Juni 2021.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap yang bersangkutan secara langsung yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 – 2021.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun Anggaran 2019 - 2021 yang didapatkan dari Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Wr 08, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116. Data tersebut merupakan dokumentasi dari Laporan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2021.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun Anggaran 2019 – 2021, rumus-rumus yang digunakan antara lain:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Kemandirian antara lain yang pertama, Membuat tabel perkembangan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 – 2021. Kedua, Menghitung Rasio Kemandirian dari tahun 2019 – 2021 dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal antara lain yang pertama, Membuat tabel Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 – 2021. Kedua, Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya.

3. Rasio Efektivitas

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efektivitas antara lain yang pertama, Membuat tabel biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD danrealisasi penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2019 – 2021. Kedua, Menghitung Rasio Efektivitas dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya.

4. Rasio Efisiensi

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Efisiensi antara lain yang pertama, Membuat table realisasi Penerimaan PAD dan target Penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan tahun 2019 – 2021. Kedua, Menghitung Rasio Efisiensi dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya.

5. Rasio Keserasian Belanja

Langkah-langkah dalam menganalisis Rasio Keserasian Belanja antara lain yang pertama, Membuat tabel Total Belanja Langsung / Belanja Tidak Langsung, dan Total Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2019 – 2021. Kedua, Menghitung Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung dengan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya.

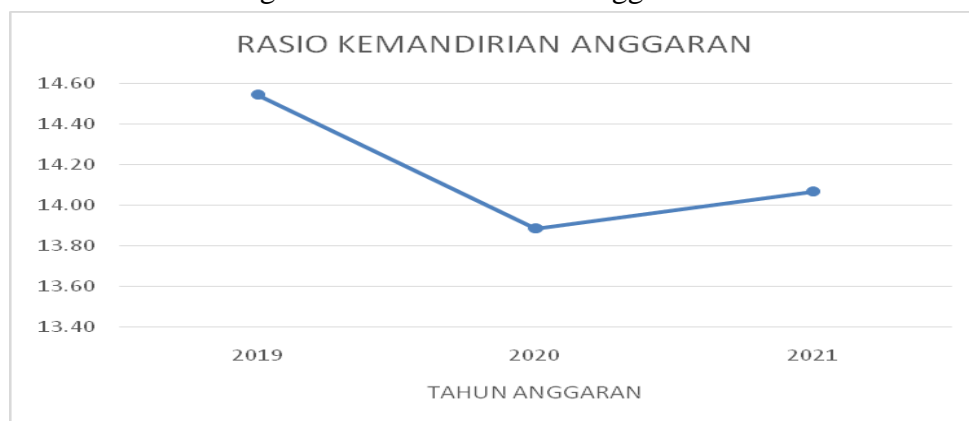
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Rasio Kemandirian

Tabel perhitungan rasio kemandirian anggaran keuangan daerah

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	BANTUAN DAN PINJAMAN	RASIO KEMANDIRIAN	POLA HUBUNGAN
2019	262,258,214,631.49	1,803,528,099,412.00	14.54 %	Instruktif
2020	233,177,792,497.49	1,679,238,305,010.00	13.89 %	Instruktif
2021	2,470,736,775.00	1,866,058,501,230.00	14.07 %	Instruktif

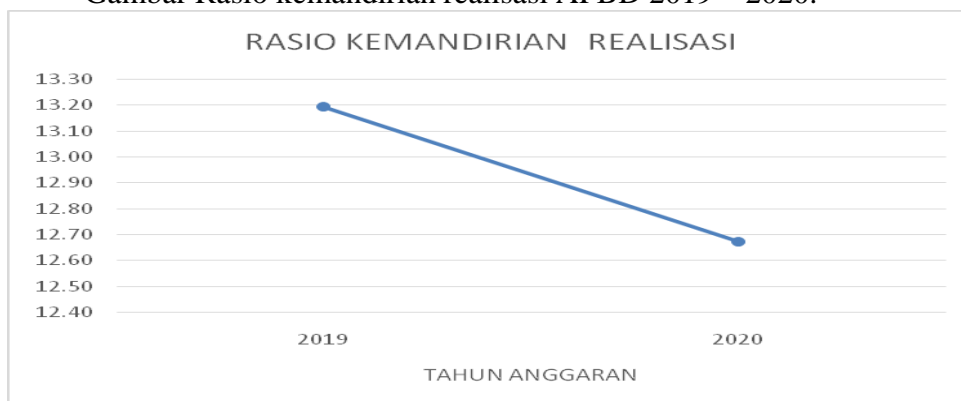
Gambar grafik rasio kemandirian anggaran 2019 – 2021.



Tabel perhitungan rasio kemandirian realisasi keuangan daerah

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	BANTUAN DAN PINJAMAN	RASIO KEMANDIRIAN	POLA HUBUNGAN
2020	211,620,744,167.24	1,669,735,191,779.00	12.67%	Instruktif
2021	262,470,736,775.00	1,866,058,501,230.00	14.07%	Instruktif

Gambar Rasio kemandirian realisasi APBD 2019 – 2020.

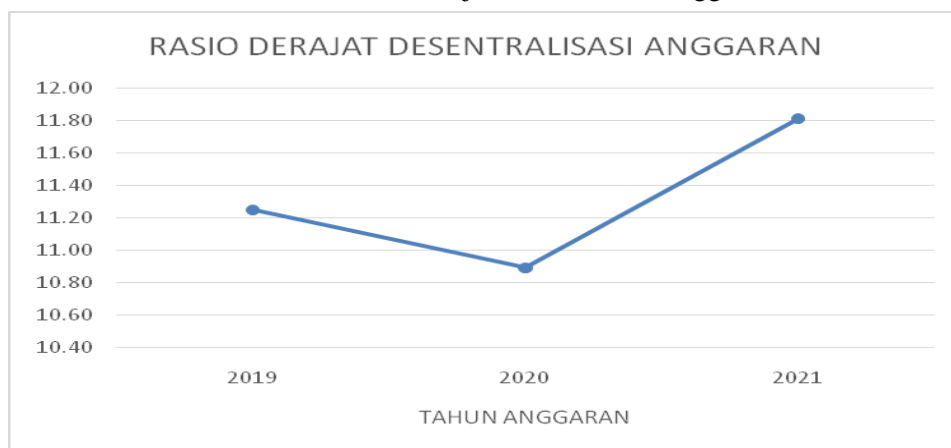


4.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 4.5 anggaran APBD rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2020 – 2021.

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO DERAJAT DESENTRALISASI	KRITERIA DERAJAT DESENTRALISASI
2019	262,258,214,631.49	2,331,628,800,501.49	11.25	Kurang
2020	233,177,792,497.49	2,140,808,956,309.49	10.89	Kurang
2021	262,470,736,775.00	2,223,065,078,005.00	11.81	Kurang

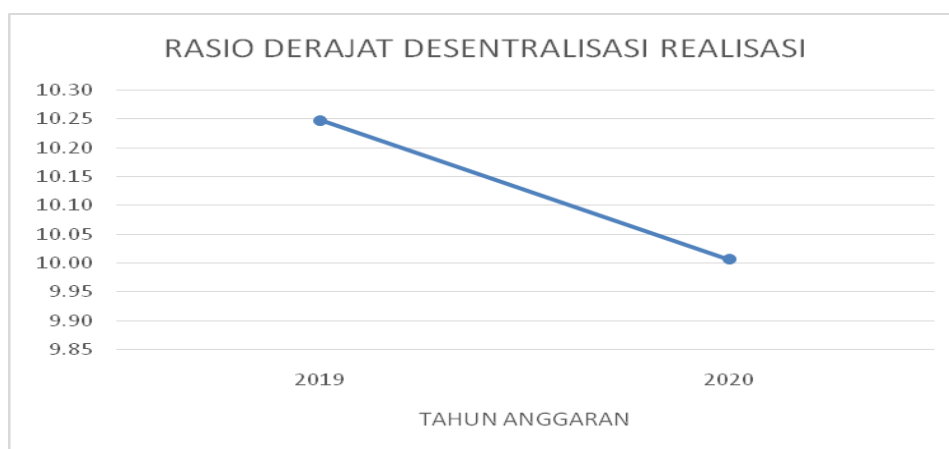
Gambar 4.5 Grafik rasio derajat desentralisasi anggaran 2019 – 2020.



Tabel realisasi APBD rasio derajat desentralisasi fiskal tahun 2019 – 2020.

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	RASIO DERAJAT DESENTRALISASI	KRITERIA DERAJAT DESENTRALISASI
2019	244,180,072,574.56	2,382,973,830,019.56	10.25	Kurang
2020	211,620,744,167.24	2,114,788,485,851.24	10.01	Kurang

Gambar 4.4 Grafik Rasio derajat desentralisasi realisasi 2019 – 2020.

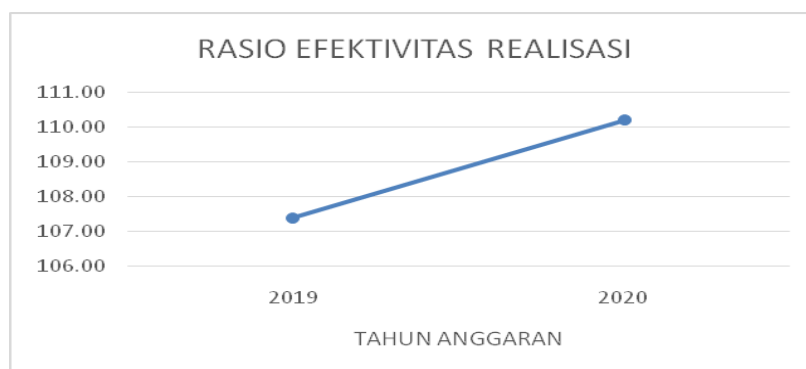


a. Rasio Efektivitas

Tabel 4.6 rasio efektifitas realisasi APBD 2019 – 2020

TAHUN ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN PAD	TARGET PENERIMAAN PAD	RASIO EFEKTIVITAS	KRITERIA RASIO EFEKTIVITAS
2019	262,258,214,631.49	244,180,072,574.56	107,40%	Sangat Efektif
2020	233,177,792,497.49	211,620,744,167.24	110,19%	Sangat Efektif

Gambar 4.6 Grafik rasio efektivitas realisasi 2019 – 2020.

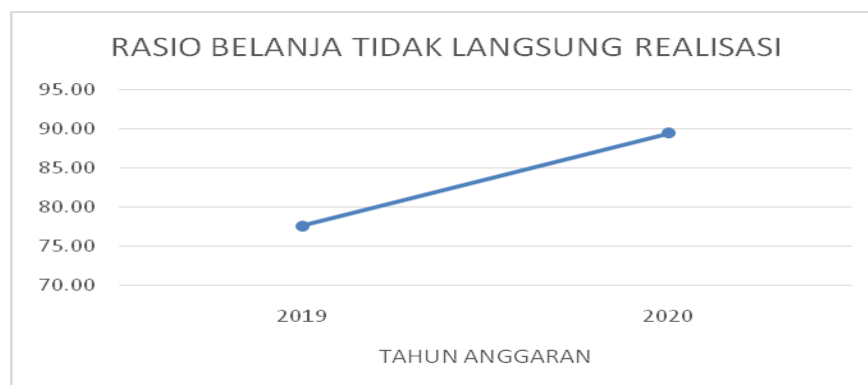


a. Rasio Keserasian Belanja

Tabel 4.7 rasio keserasian belanja tidak langsung realisasi APBD 2019 – 2020]

TAHUN ANGGARAN	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO BELANJA TIDAK LANGSUNG
2019	1,459,401,400,166.27	1,880,330,739,576.54	77.61%
2020	1,502,703,707,018.85	1,679,804,754,219.56	89.46%

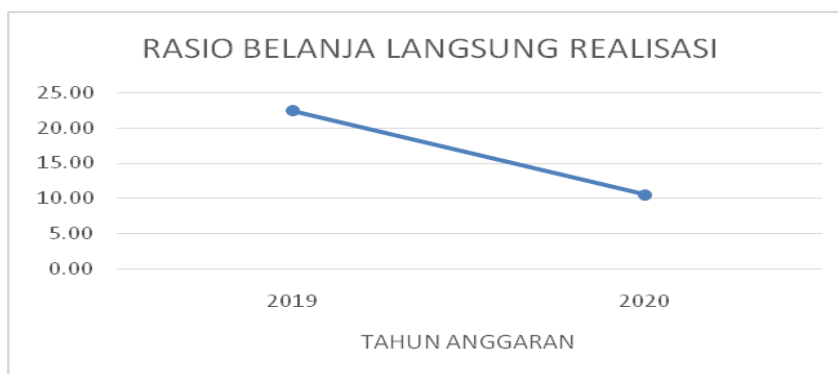
Gambar 4.8 Grafik rasio belanja tidak langsung realisasi 2019 – 2020.



Tabel 4.9 rasio keserasian belanja langsung realisasi APBD 2019 – 2020

TAHUN ANGGARAN	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO BELANJA LANGSUNG
2019	420,929,339,410.27	1,880,330,739,576.54	22.39%
2020	177,101,047,200.71	1,679,804,754,219.56	10.54%

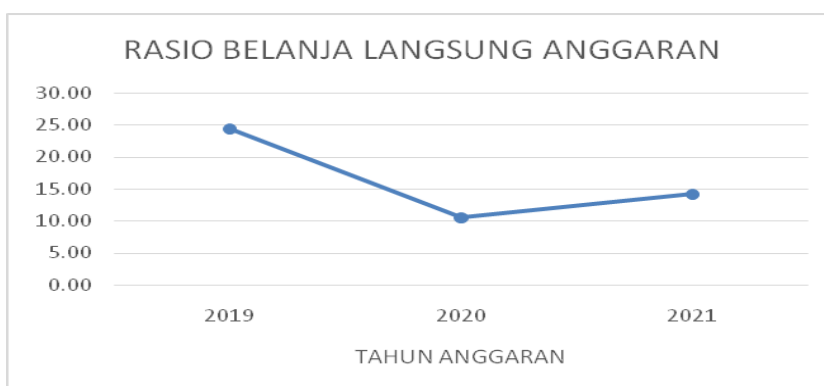
Gambar 4.10 Grafik rasio belanja langsung realisasi



Tabel 4.10. rasio keserasian belanja langsung anggaran APBD 2019 – 2021.

TAHUN ANGGARAN	TOTAL BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA DAERAH	RASIO BELANJA LANGSUNG
2019	497,501,099,312.46	2,039,054,773,612.65	24.40%
2020	188,584,102,239.57	1,782,976,875,281.24	10.58%
2021	260,496,205,973.00	1,829,558,138,305.00	14.24%

Gambar 4.11 Grafik rasio belanja langsung anggaran



5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tingkat Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Bangkalan dikatakan kurang. Hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kecilnya proporsi PAD dihadapkan pada jumlah keseluruhan penerimaan daerah mengindikasikan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat dominan. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan daerah, serta peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.

2. Menurut kriteria Rasio Efektivitas, tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dikatakan Sangat Efektif. Hal ini menggambarkan tingkat kemampuan daerah semakin baik. Dari hasil perhitungan rasio efektifitas Kabupaten Bangkalan presentase pada tahun 2019 adalah sebesar 107,40% dengan rincian realisasi 262.258.214.631,49 dari target sebesar 244.180.072.574,56, surplus sebesar 24.155.749.042.824,51. Sementara presentase pada tahun 2020 sebesar 110,19 %, dengan rincian realisasi 233.177.792.497,49 dari target sebesar 211.620.744.167,24, surplus sebesar 21.557.048.330,20.
3. Dari data yang tercantum dalam tabel dan grafik, Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangkalan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar 77,61% dan 89,46%. Sedangkan Rasio Anggaran Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021, Rasio Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 75,56%, tahun 2020 sebesar 84,89%, dan tahun 2021 sebesar 85,76%.
4. Melalui analisis rasio modal atau belanja langsung Pemerintah Kabupaten Bangkalan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan guna untuk membiayai modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan di Kabupaten Bangkalan

5.2. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil perhitungan normatif dan analisis , maka saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten bangkalan seyogyanya mampu mengembangkan kreativitas perihal pemungutan retribusi dan pajak, khususnya bagi sektor rill yang dinilai ekonomis. Sementara ini kontribusi terbesar terhadap PAD bersumber dari bidang kesehatan, yaitu BLUD rumah sakit daerah.
2. Adapun sektor lain yang belum digali dan dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten bangkalan ialah pajak rstoran, rumah makan, serta retribusi pasar dan parkir. Guna meningkatkan pendapatan diatas sangat disarankan pemerintah daerah menerapkan pembayaran berbasis tekhnologi guna mengurangi kebocoran, seperti Tapping box dan parkir eletronik.
3. Adapun sumber pendapatan yang belum dikelola dengan baik yaitu pengelolaan anggaran pada BUMD dan pengembangan pariwisata. Jika Pemerintah berhasil memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, maka pajak yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.
4. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah hendaklah memberi informasi secara rinci kepada masyarakat tentang kewajiban mereka sebagai pembayar pajak dan retribusi, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian kewajiban jumlah pajak dan retribusi yang harus dibayarkan.
5. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap pihak

yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi supaya tidak terjadi kecurangan. Karena besarnya pajak dan retribusi tidak hanya sebagai komponen utama untuk meningkatkan PAD, tetapi juga sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

6. Perlunya pemerintah daerah kabupaten bangkalan untuk melakukan evaluasi terhadap belanja tidak langsung, khususnya belanja operasi/belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Rasionalisasi belanja tidak langsung secara dominan dapat bersumber dari efisiensi belanja pegawai yang menyentuh 58% dari total belanja pada tahun 2019 dan 63% pada tahun 2020. Efisiensi belanja pegawai dapat diambil dari penghitungan kembali atas tambahan pendapatan pegawai (TPP), menyesuaikan terhadap kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 58 PP Nomor 12 tahun 2019.
7. Perlunya pemerintah daerah melakukan rasional terhadap belanja tidak langsung sebagai upaya efisiensi pendapatan dan penerimaan daerah guna menopang belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti belanja infrastruktur jalan, belanja gedung rumah sakit, puskesmas, sekolah, yang merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Semakin besar belanja langsung maka semakin baik. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal memprioritaskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.